



PEMKOT BERHASIL PERTAHANKAN WTP 16 KALI BERTURUT-TURUT

Hasto Targetkan 100 Persen Rekomendasi Ditindaklanjuti

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta menorehkan prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga 16 kali berturut-turut. Meski demikian Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo bertekad untuk mengejar seluruh rekomendasi mampu ditindaklanjuti hingga 100 persen.

Hasto menilai capaian WTP merupakan bentuk pengakuan atas LKPD yang telah disajikan sesuai dengan aturan perundangan. Hal tersebut menjadi capaian positif mengingat Kota Yogyakarta merupakan peraih WTP terbanyak dibanding kabupaten lain di DIY. "Kami semua tentu juga mengapresiasi karena semua kabupaten dan kota di DIY ini mampu meraih WTP. Tetapi harus dipahami juga kalau opini ini belum menjamin 'fraud'," ungkapnya, Minggu (20/4).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten dan kota di DIY digelar pada Kamis (17/4) lalu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Pada kesempatan itu Kota Yogyakarta mampu meraih WTP hingga 16 kali,

Kabupaten Sleman 14 kali, Bantul 13 kali, Kulonprogo 12 kali dan Gunungkidul 10 kali. Capaian WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2024.

Hasto mengungkapkan seiring capaian WTP tersebut BPK RI Perwakilan DIY juga menorehkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah. Batas waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi ialah 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

"Kalau kita lihat, sejak tahun 2005 jumlah rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh Kota Yogyakarta baru mencapai 93,14 persen. Memang sudah jauh di atas target nasional, tetapi di periode ini akan saya

kejar 100 persen ditindaklanjuti. Ini untuk mewujudkan clean and clear government," ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh Hasto, guna menjamin pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, capaian WTP saja tidak cukup. Sehingga arahan dari BPK RI Perwakilan DIY sangat dibutuhkan supaya penyelenggaraan keuangan daerah dapat menjamin atau menutup celah pelanggaran. "Bagaimana kualitas ini yang harus ditingkatkan. Seringkali orang cerdas itu bisa kalah dengan kepentingan. Jangan sampai kita bekerja membawa-bawa kepentingan, kecuali kepentingan untuk melayani," urainya.

Sementara Kepala BPK RI

Perwakilan DIY Agustin Suhartatik, menyampaikan opini WTP diberikan dengan mendasarkan beberapa kriteria. Di antaranya kepatuhan atas peraturan perundangan, efektivitas pengendalian internal serta pelaporan standar akuntansi. Meski demikian, pihaknya juga menegaskan jika opini WTP belum menjamin terbebas dari kecurangan atau fraud. Jika dalam prosesnya ditemukan kecurangan yang berdampak pada potensi kerugian negara maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Selama pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2024, BPK RI Perwakilan DIY menaruh catatan pada berbagai aspek. Antara lain menyangkut penatausahaan piutang pajak daerah yang belum memadai, usaha reklame yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak atau tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengelolaan dana hibah dan bansos hingga



KR-Ardhi Wahan

Hasto Wardoyo didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat, menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Yogyakarta 2024.

menyangkut barang milik daerah.

"Tetapi harus kami akui bahwa penyelesaian rekomendasi oleh kabupaten dan kota di DIY ini tergolong cukup tinggi. Ini bentuk komitmen pemda dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah," katanya.

Menurutnya, target nasional

atas tindaklanjut rekomendasi ialah 75 hingga 80 persen. Sedangkan seluruh kabupaten dan kota di DIY capaiannya di atas 90 persen. Kota Yogyakarta mencapai 93,14 persen, Sleman 94,2 persen, Kulonprogo 96,76 persen, Bantul 94,42 persen dan Gunungkidul 99,14 persen. Pihaknya pun berharap seluruh rekomendasi yang dibe-

rikannya mampu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Tentunya kami apresiasi atas komitmen lembaga dewan dan pemerintah daerah yang ada di DIY ini. Jika ada yang kurang jelas atau apa yang sudah kami rekomendasikan, DPRD bisa berkonsultasi dengan BPK sesuai diatur dalam MoU," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005